



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 116 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA
TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada tanggal 17 Juli 2024 dan pergantian bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, perlu meninjau Kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 untuk dilakukan Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:/2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

10. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

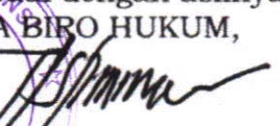
Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR NAMA-NAMA

NO	INSTANSI	NAMA	NIP	JABATAN
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RITA DESSY FAUZIAH ANANDA	19741210 200605 2 002	Pengguna Anggaran
		HAMSYAH LAPALLU	19850201 201004 1 002	Bendahara Pengeluaran
2.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG (K).,MH.Kes	19710603 200012 1 004	Pengguna Anggaran
		MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL	19850729 200605 2 001	Bendahara Pengeluaran
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	YAN UKAGO, ST. MT	19710129 200112 1 002	Pengguna Anggaran
		EDIZON PABILANG, ST	19880519 201511 1 001	Bendahara Pengeluaran
4.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN, PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SAT POLPP	VICTOR FUN, S.Sos., M.Si	19720218 199301 1 002	Pengguna Anggaran
		ULFA ROCHIMATUL ANDAIYAH, A.Md	19801031 200801 2 011	Bendahara Pengeluaran

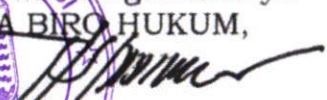
5.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SEMI GOBAY, S.Sos	19790502 201001 1 026	Pengguna Anggaran
		ANI DEGEI, S.Sos	19770804 201104 2 001	Bendahara Pengeluaran
6.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	FRETS JAMES BORAY, SE, M.Si	19670218 198912 1 002	Pengguna Anggaran
		SISILIA LIMBONG P, SE	19840421 201104 2 002	Bendahara Pengeluaran
7.	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	FRENCE THE PAPARA, S.IP., MAP	19721013 199203 1 004	Pengguna Anggaran
		HERRY KAMISOPA, S.Sos	19760120 200112 1 005	Bendahara Pengeluaran
8.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	YAN RICHARD PUGU, S.Hut, M.Si	19731024 200012 1 002	Pengguna Anggaran
		ARLIN RATUNNA	19690507 199202 2 002	Bendahara Pengeluaran
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	YOPI MURIB, SE., MM	19730304 200112 1 003	Pengguna Anggaran
		ANDRIS PANDENSOLANG	19820403 201004 1 003	Bendahara Pengeluaran
10.	DINAS PERHUBUNGAN	WASHINGTON LUMBAN GAOL,A.Ks.,M.Si	19720620 199803 1 010	Pengguna Anggaran
		SUPARTI	19790120 201507 2 001	Bendahara Pengeluaran
11.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	HAM A. NAWIPA, S.SIT	19760426 199103 1 008	Pengguna Anggaran
		NOVITA GOBAY	19921130 201511 2 001	Bendahara Pengeluaran
12.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NORBETUS MOTE, SE, M.Si	19731123 200502 1 003	Pengguna Anggaran
		STEPANUS ADII, SE	19781025 200112 1 003	Bendahara Pengeluaran
13.		Ir. SYAHRIAL, MM	19650225 198903 1 010	Pengguna Anggaran

	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	KARIKARTI, SE	19870116 201002 2 025	Bendahara Pengeluaran
14.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DIANA SERILA YOUW, S.Sos., M.Si	19740924 200112 2 002	Pengguna Anggaran
		BERNADETA YOUW, S.E	19770625 200605 2 001	Bendahara Pengeluaran
15.	SEKRETARIAT DPRD	BARNABAS HABEL YOTENI, M.KP	19690212 199003 1 015	Pengguna Anggaran
		FRANS JERYS, ST	19810610 201512 1 001	Bendahara Pengeluaran
16.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	JULL EDDY WAY, S.Sos	19780609 200312 1 007	Pengguna Anggaran
		MUHAMMAD YUSUF	19920407 201104 1 001	Bendahara Pengeluaran
17.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	YOHAN TONO TENOYE, SE	19700129 199701 1 001	Pengguna Anggaran
		MUHAMMAD HENDRA SAPUTRO, ST	19930907 201501 1 001	Bendahara Pengeluaran
		PULUNG SETYO ANGGORO, SE	19820831 201004 1 003	Bendahara Penerimaan
		NICOLAS B.F. MAYOR, A.Md	19711103 200012 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran (UPT Nabire)
		SIHOL P. TAMBUNAN	19810307 201511 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT Nabire)
		JON SROYER	19740614 200902 1 002	Bendahara Penerimaan Pembantu (UPT Nabire)
		OTAY ENEMBE, SE	19780915 201104 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (UPT Mulia)
		ALMINCE MOTE, SP	19801026 201004 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT Mulia)
		SLAMET DARSONO	19780311 201001 1 023	Bendahara Penerimaan Pembantu (UPT Mulia)
		AKHIR IRIBARAM, SE., MM	19680612 199712 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (UPT Mimika)
		ALFIAN ARMIN	19851026 201504 1 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT Mimika)
		YERMIAS EDMADRIGO M. IYAI, S.Tr. IP	20000730 20220801 001	Bendahara Penerimaan Pembantu (UPT Mimika)

		ABIAN PEKEY, S.Sos	19721007 199610 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (UPT Paniai)
		MURDIONO, SE	19800507 200904 1 009	Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT Paniai)
		YOSEPH SEMUEL KREEUW, SH	19860919 201104 1 002	Bendahara Penerimaan Pembantu (UPT Paniai)
18.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	ROLAND JAMES, S.STP., MM	19800528 199810 1 002	Pengguna Anggaran
		GRACE PARLIN AIWUI, S.STP	19961128 202008 2 001	Bendahara Pengeluaran
19.	INSPEKTORAT	Drs. SAMUEL RIHI, M.Si	19650915 199307 1 001	Pengguna Anggaran
		ERNA PURWATI, SE	19850204 201501 2 002	Bendahara Pengeluaran
20.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Drs. THEPHILUS LUKAS AYOMI	19730301 199301 1 001	Pengguna Anggaran
		ALFRIDA SOMBA, ST	19820430 201503 2 002	Bendahara Pengeluaran
21.	SEKRETARIAT MRP	DANIEL MAIPON, S.STP	19760423 199612 1 001	Pengguna Anggaran
		RONALD MUAL	19800925 201503 1 002	Bendahara Pengeluaran
22.	SEKRETARIAT DAERAH	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., MM	19780517 199810 1 002	Pengguna Anggaran
		ALFREDO MANASE ASMURUF, S.STP., M.Si	19860302 200412 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Barang dan Jasa
		LAMBERTUS WAKERKWA, S.Sos	19680213 199610 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintahan
		BERNARD SITORUS, ST	19750803 200312 1 007	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Umum
		YOHANES YOU, S.Ag., M.Hum	19750114 200003 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		MENASE KADEPA. SE., M.Si	19820510 201004 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Organisasi
		YULIUS MANURUNG, SH., MH	19760608 200212 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum

	BEATRICK ROMBE, SE	19891223 201104 2 002	Bendahara Pengeluaran Setda
	SURYA DARMAN RITHO, ST	19800807 201712 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum
	BAMBANG WALGITO, S.IP	19721206 199303 1 005	Bendahara Pengeluaran Pembantu Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	YOSEP DEGEI, S.STP	19960421 201008 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Organisasi
	FRISKA SITORUS, S.Sos	19821004 201503 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum
	MIRNAH, A.Md	19801203 201510 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Petmerintahan
	EKO BUDIYANTO, S.E.	19810924 201001 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Barang dan Jasa

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002